

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB),
INFLASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2011-2017**

***ANALYSIS OF THE EFFECT OF REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS OF BRUTO
(GRDP), INFLATION, AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX (IPM) ON INCOME IN
INCOME OF YOGYAKARTA AREA IN YEAR 2011-2017***

¹⁾Dewi Septiani Dwi Kusuma, ²⁾Dra.Sudati Nur Sarfiah, ³⁾Yustirania Septiani
Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
dewidwi143@gmail.com

Abstrak

Ketimpangan pendapatan merupakan sebuah masalah bagi semua negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Dampak dari ketimpangan pendapatan mempengaruhi kelangsungan pembangunan, khususnya pembangunan dibidang ekonomi. D.I Yogyakarta menempati urutan ke-1 tertinggi dalam tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa selama tahun 2011-2017 dengan tingkat pengeluaran yang paling tidak merata di Pulau Jawa dan mengungguli lima provinsi lain. Tingkat pengeluaran D.I Yogyakarta tidak merata dikarenakan penduduk D.I Yogyakarta memiliki pola konsumsi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat PDRB, inflasi, dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta pada tahun 2011-2017. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari instansi pemerintah yang terlibat pada tahun 2011-2017. Data yang digunakan berupa data PDRB, inflasi, IPM dan indeks gini dari tahun 2011-2017. Model analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan program Eviews 9. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial PDRB, inflasi, dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama PDRB, inflasi, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan D.I Yogyakarta.

Kata kunci : PDRB, Inflasi, IPM dan Ketimpangan Pendapatan

Abstract

Inequality of income is a problem for all countries, both in developed and developing countries. The impact of income inequality affects the sustainability of development, especially development in the economic field. D.I Yogyakarta ranks first in the level of income inequality in Java during 2011-2017 with the most uneven level of expenditure in Java and outperforming five other provinces. Yogyakarta D.I expenditure levels are uneven because residents of D.I Yogyakarta have different consumption patterns. This study aims to analyze the effect of GRDP, inflation, and HDI on income inequality in D.I Yogyakarta in 2011-2017. The type of data in this study uses secondary data from government agencies involved in 2011-2017. The data used in the form of GDP data, inflation, HDI and Gini index from 2011-2017. The analysis model used is panel data regression with the help of the Eviews 9. The results of the regression analysis show that partially GRDP, inflation, and

HDI have a significant influence on income inequality in D.I Yogyakarta. The results of this study also show that together the GRDP, inflation, and HDI have a significant effect on the income inequality of D.I Yogyakarta.

Keywords: GRDP, Inflation, HDI and Income Inequality

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan pendapatan relatif warga negara berpendapatan tinggi dan rendah. Ketimpangan pendapatan merupakan sebuah masalah bagi semua negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Dampak dari ketimpangan pendapatan mempengaruhi kelangsungan pembangunan, khususnya pembangunan dibidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya meniadakan, setidaknya mengurangi, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan (Mudrajad Kuncoro, 2000:10). Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, ketimpangan juga dapat dipandang tidak adil dalam kasus ketimpangan pendapatan yang ekstrim (Todaro, 2003:234).

Ketimpangan pendapatan antar provinsi di Pulau Jawa masih terjadi dan perbedaannya cukup tinggi. Provinsi dengan nilai ketimpangan tertinggi adalah D.I Yogyakarta, kemudian disusul Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

D.I Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat pengeluaran yang paling tidak merata di Pulau Jawa dan mengungguli lima provinsi lain. Menurut Sairi Hasbullah Deputy Bidang Statistik

Sosial Badan Pusat Statistik (2017) tingkat pengeluaran D.I Yogyakarta tidak merata dikarenakan penduduk D.I Yogyakarta memiliki pola konsumsi yang berbeda. Rumah tangga miskin di D.I Yogyakarta sangat hemat dalam mengatur pengeluaran. Sedangkan kelas menengah-atas pengeluarannya lebih besar dari kelas rumah tangga. Kondisi perekonomian masyarakat secara umum belum mencapai tingkat pemerataan pendapatan yang sama dan masih ditemui kekurangan. Hal ini mengidentifikasi bahwa pemerintah belum berhasil menjaga pemerataan pendapatan masyarakat baik di kabupaten/kota maupun di D.I Yogyakarta.

Ketimpangan di kabupaten/kota di D.I Yogyakarta yang diwakili oleh rasio gini menunjukkan bahwa daerah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta berada pada pemerataan dengan level sedang. Menurut nilainya rata-rata rasio gini terendah berada di wilayah Kota Yogyakarta. Ketimpangan pendapatan pada Wilayah kabupaten/kota D.I Yogyakarta disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Ketimpangan yang terjadi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan krisis finansial.

Tujuan dilakukannya pemerataan pendapatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang

meningkat dan distribusi yang merata. Peningkatan kesejahteraan dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya (Sadono Sukirno, 2006:425). Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, harus membandingkan pendapatan riil daerah yang bersangkutan, dengan PDRB sebagai indikator yang digunakan.

Menurut Williamson (dalam Sjafrizal, 2008:95) dalam tahap awal pembangunan ekonomi disparitas dalam distribusi pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang pada awalnya sudah relatif maju, misalnya dalam pembangunan industri, infrastruktur dan sumber daya manusia. Kemudian pada tahap pertumbuhan yang lebih besar terjadi konvergensi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan mengalami penurunan.

Sepanjang tahun 2011-2017 nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di kabupaten/kota di D.I Yogyakarta mengalami peningkatan. Terdapat perbedaan nilai PDRB yang mencolok antara kabupaten/kota D.I Yogyakarta.

Menurut Irma Adelman dan Chynthia Taft Morris (dalam Arsyad, 2004:226), salah satu penyebab ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan adalah inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.

Terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama periode tertentu. Lonjakan inflasi yang terlalu

tinggi dan tidak diimbangi oleh pemerataan ekonomi akan memperluas kemiskinan, bertambahnya tingkat pengangguran, penurunan kesejahteraan dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Ketika inflasi mengalami peningkatan maka akan menyebabkan turunnya tingkat investasi. Hal ini dikarenakan kenaikan inflasi akan mendorong naiknya tingkat suku bunga, kenaikan suku bunga tersebut pada gilirannya akan menurunkan investasi. Turunnya investasi dapat menurunkan kapasitas produksi, hal tersebut dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran dengan begitu pendapatan per kapita masyarakat akan menurun. Sebaliknya inflasi yang ringan akan meningkatkan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan per kapita masyarakat akan meningkat.

Kurun waktu 2011-2017 inflasi di kabupaten/kota D.I Yogyakarta mengalami fluktuatif di setiap tahunnya pada masing-masing wilayah. Inflasi yang berfluktuasi tersebut akan mempengaruhi pendapatan daerah kemudian akan menimbulkan perbedaan pendapatan antar wilayah.

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah/daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup secara merata atau biasa disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Irawan, 2002:5).

IPM antar kabupaten/kota di D.I Yogyakarta pada tahun 2011-2017 mengalami peningkatan. Diketahui bahwa angka harapan hidup warga D.I Yogyakarta cukup tinggi. IPM tertinggi berada di Kota Yogyakarta, sedangkan IPM terendah

berada di kabupaten Gunung Kidul. IPM di masing-masing daerah berbeda sehingga menjadikan rasio gini atau ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota di D.I Yogyakarta tergolong tinggi. Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi jika tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan akan mengurangi kesejahteraan.

Ketimpangan pendapatan antar wilayah menjadi salah satu permasalahan yang serius. Berdasarkan permasalahan yang ada maka peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017”.

METODE ENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:199). Sedangkan penelitian pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivis, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017:11).

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel bebas atau independen (X), sedangkan ketimpangan pendapatan sebagai variabel terikat atau dependen (Y).

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan mendapatkan informasi atau menyalin data yang sudah ada melalui jurnal, dokumentasi, dan lain-lain yang masih berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data diperoleh dari perhitungan data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data indeks gini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Panel

Model regresi data panel yaitu model regresi dengan menumpuk observasi data *time series* dengan data *cross section* (Imamudin Yuliadi, 2015:135).

Dengan penentuan model estimasi melalui pendekatan *Common Effect*, *Fixed Effect*, *Random Effect* (Imamudin Yuliadi, 2015:136).

a. *Common Effect*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*.

b. *Fixed Effect*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antara individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepsnya.

c. *Random Effect*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

2. Uji Kesesuaian Model

Uji Kesesuaian Model terdiri dari Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar pengujian hipotesis berdasarkan model analisis tidak bias dan hasilnya mendekati akurat atau sama dengan kenyataan.

Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedestisitas.

4. Uji t

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh antar variabel secara individu dalam menerangkan terhadap variabel dependen.

5. Uji F

Untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Mudrajad Kuncoro, 2003: 220).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Kesesuaian Model

a. Uji Chow

Uji *chow* dilakukan untuk menentukan model terbaik antara model *common effect* dengan *fixed effect*. Dengan ketentuan H_0 dari uji *chow* yaitu *common effect* dan H_1 dari *fixed effect*. Apabila hasil uji *chow* menunjukkan nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 maka dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah *fixed effect*.

Berdasarkan hasil uji *chow* yang terdapat dalam lampiran 2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square bernilai 0,0000. Dikarenakan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka estimasi model yang lebih tepat digunakan adalah model *fixed effect*.

b. Uji Hausman

Uji *hausmant* dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *fixed effect* dengan *random effect*. Dengan ketentuan H_0 dari uji *hausmant* yaitu *random effect* dan H_1 dari *fixed effect*. Apabila hasil uji *hausman* menunjukkan nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 maka dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Berdasarkan hasil uji *hausman* yang terdapat dalam lampiran menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga menyatakan bahwa model terbaik menurut uji *hausman* adalah *fixed effect*.

Hasil uji *chow* dan uji *hausman* menyatakan bahwa model yang terbaik untuk regresi data panel dalam penelitian ini adalah *fixed effect* maka tidak perlu dilakukan uji LM untuk mencari model terbaik.

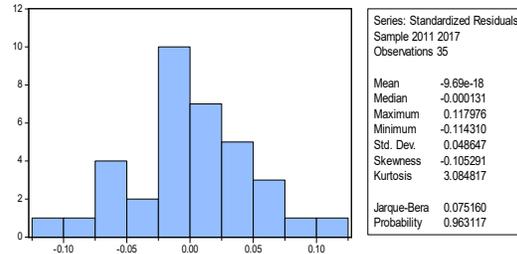
2. Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka hasil koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar 8,275161 menyatakan bahwa jika semua variabel independen yaitu PDRB (X1), inflasi (X2), dan IPM (X3) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, maka ketimpangan pendapatan mengalami kenaikan sebesar 8,275161%.
- b. Nilai koefisien variabel PDRB (X1) adalah sebesar 1,270658. Artinya kenaikan variabel PDRB sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan ketimpangan pendapatan (Y) sebesar 1,270658%, dengan asumsi variabel inflasi (X1) dan IPM (X3) tetap (ceteris paribus). Sehingga PDRB (X1) memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pendapatan (Y).
- c. Nilai koefisien variabel inflasi (X2) sebesar -0,012253. Artinya kenaikan variabel inflasi sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan ketimpangan pendapatan (Y) sebesar 0,012253%, dengan asumsi variabel PDRB (X1) dan IPM (X3) tetap (ceteris paribus). Sehingga inflasi (X2) memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Y).
- d. Nilai koefisien IPM (X3) sebesar -4,622331 yang mempunyai arti bahwa ketika terjadi kenaikan variabel dana bagi hasil sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan ketimpangan pendapatan (Y) sebesar 4,622331%, dengan asumsi variabel PDRB (X1) dan inflasi (X2) tetap (ceteris paribus). Sehingga IPM (X3) memiliki hubungan negatif terhadap ketimpangan pendapatan (Y).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Sumber : Hasil Analisis *eviews 9*

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel deenden dan independen berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas yang dilakukan menggunakan Uji *Jarque-Bera (JB test)*. Hasil analisis menunjukkan nilai Jarque-Bera Probabilityn sebesar 0,963117 atau lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi yang sempurna di antara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi.

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1,000000	-0,072242	0,825830
X2	-0,072242	1,000000	-0,134365
X3	0,825830	-0,134365	1,000000

Sumber: Data di olah menggunakan *eviews 9*, 2018

Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien antarvariabel bebas kurang dari 0,9 yang berarti bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada masing-masing variabel bebas.

c. Uji Autokorelasi

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson (DW)*. Nilai DW yang berasal di antara nilai DU dan 4-DU menunjukkan model yang terbebas dari masalah autokorelasi. Adapun hasil uji autokorelasi

menggunakan *evIEWS* pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	2,009355
--------------------	----------

Sumber: Data di olah menggunakan *evIEWS* 9, 2018

Dapat dijelaskan bahwa $1,6528 < 2,009355 < 2,3472$. Artinya hasil pengujian autokorelasi memenuhi syarat tersebut dan dapat dinyatakan bahwa model yang digunakan terbebas dari adanya autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan heteroskedastisitas untuk membuat model menjadi tidak konstan. Dari hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas ketiga variabel independen bernilai lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa regresi model bersifat homoskedastisitas.

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Prob
X1	4,16E-06	0,4022
X2	0,003847	0,2598
X3	-0,004057	0,6162
C	0,262034	0,6376

Sumber: Data di olah menggunakan *evIEWS* 9, 2018

4. Uji t

a. Analisis pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2017.

Dari hasil analisis regresi diperoleh:

1. Nilai t hitung variabel X1 yaitu 4,610535.
2. Menggunakan nilai *degree of freedom* (df) = 35-3 = 32.
3. Menggunakan taraf signifikansi 95% ($\alpha = \frac{5}{2}\% = 2,5\%$).
4. Nilai t tabel sebesar 2,03693.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $4,6105 > 2,03693$. Sehingga ada pengaruh signifikan PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta.

b. Analisis pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2017.

Dari hasil analisis regresi diperoleh:

1. Nilai t hitung variabel X2 yaitu -2,044949.
2. Menggunakan nilai *degree of freedom* (df) = 35-3 = 32.
3. Menggunakan taraf signifikansi 95% ($\alpha = \frac{5}{2}\% = 2,5\%$).
4. Nilai t tabel sebesar 2,03693.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2,044949 > 2,03693$. Sehingga ada pengaruh signifikan inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta.

c. Analisis pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2017.

Dari hasil analisis regresi diperoleh:

1. Nilai t hitung variabel X1 yaitu -2,551993.
2. Menggunakan nilai *degree of freedom* (df) = 35-3 = 32.
3. Menggunakan taraf signifikansi 95% ($\alpha = \frac{5}{2}\% = 2,5\%$).
4. Nilai t tabel sebesar 2,03693.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2,551993 > 2,03693$. Sehingga ada pengaruh signifikan IPM terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta.

5. Uji F

1. Analisis pengaruh PDRB, inflasi dan IPM secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2017.

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh PDRB, inflasi, dan IPM secara simultan terhadap variabel ketimpangan pendapatan.

Dari tabel diatas diperoleh hasil yang menyatakan bahwa:

1. Nilai F hitung pada uji F yaitu sebesar 8,413650.
2. Menggunakan nilai degree of freedom (df1) = k-1= 3-1=2 dan (df2)= n-k= 35-3=32.
3. Menggunakan taraf signifikansi 95% ($\alpha=5\%$).
4. Nilai F tabel sebesar 3,29.

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $8,413650 > 3,29$. Sehingga PDRB, inflasi dan IPM mempunyai pengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Salah satu alat ukur untuk mengetahui uji determinasi R^2 yaitu melihat nilai koefisien *Adjusted R-square*. Nilai *adjusted R Square* artinya nilai R Square yang telah terkoreksi oleh nilai *standar error*. Nilai *Adjusted R-square* digunakan agar penggunaan koefisien determinasi tidak bias terhadap jumlah variabel.

Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi

		Mean	
R-squared	0.68567	dependent var	0.34351
Adjusted R-squared	0.60417	S.D. dependent var	0.08677

Sumber: Data di olah menggunakan *evIEWS* 9, 2018

Berdasarkan nilai *adjusted R Square* sebesar 60,4170%. Artinya setelah terkorelasi nilai *standar error* PDRB, inflasi dan IPM mampu menjelaskan ketimpangan pendapatan sebesar 60,4170%. Sedangkan sisanya 100% - 60,4170% atau sebesar 39,583% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2017.

Berdasarkan hasil pengujian, nilai *t* hitung lebih besar dari *t* tabel yaitu $4,6105 > 2,03693$. Sehingga PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. Menurut BPS (2017) PDRB berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta, dikarenakan perbedaan sektor penggerak perekonomiannya. Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul penggerak utama perekonomiannya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Perbedaan sektor penggerak perekonomian berdampak pada laju PDRB masing-masing wilayah berbeda. Perbedaan terjadi karena proses pertumbuhan yang berfokus pada perluasan sektor yang produktivitasnya tinggi seperti industri dan perdaganga.

Kabupaten Sleman menghasilkan laju PDRB tertinggi dibanding wilayah lainnya di D.I Yogyakarta selama sepanjang tahun 2011-2017. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sleman masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan lebih cepat, seperti pariwisata, perdagangan dan sebagainya. Kemudian diikuti kota Yogyakarta yang menjadi pusat

pemerintahan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih maju, sehingga semua aktivitas ekonomi tersedia, kecuali pertanian dan penggalian. Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo penggerak utama perekonomiannya adalah sektor pertanian. Kabupaten Gunung Kidul yang menempati posisi keempat masih mengandalkan sektor pertanian dalam menopang perekonomian. Sementara lapangan usaha pertanian yang diusahakan berada di lahan pertanian pegunungan berbatu yang relatif lebih sulit untuk memacu produktivitas pertaniannya.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Naelun Autor (2018:61) didukung oleh penelitian Sultan dan Jamzani Sodik (2010:44) bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut dikarenakan selama ini PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang dalam peningkatannya berdampak pada ketimpangan pendapatan.

2. Pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2017.

Berdasarkan hasil pengujian, nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2,044949 > 2,03693$. Sehingga inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di D.I Yogyakarta dikarenakan, kondisi inflasi di D.I Yogyakarta baik di kabupaten/kota masih berada di tahap normal dan dalam kondisi yang kondusif. Terkendalinya inflasi disebabkan oleh rendahnya inflasi volatile food dan inflasi inti (Bank Indonesia, 2017).

Inflasi yang terkendali memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan

inflasi mampu memberikan semangat kepada pengusaha, karena dengan kenaikan harga yang ringan para pengusaha mendapatkan lebih banyak keuntungan sehingga para pengusaha lebih meningkatkan produksinya, peningkatan produksi tersebut berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sehingga peningkatan inflasi berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Galaxi Chrisamba dan Birgitta Dian Saraswati (2016:50) sejalan dengan penelitian Negara (2011:63) bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Ketika inflasi meningkat pengeluaran penduduk berpendapatan sedang di kota akan meningkat sehingga ketimpangan menurun. Berkurangnya ketimpangan dikarenakan orang-orang desa merupakan pemasok barang-barang kebutuhan di kota sehingga dengan kenaikan inflasi akan meningkatkan pendapatan.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2017.

Berdasarkan hasil pengujian nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2,551993 > 2,03693$. Sehingga IPM berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di D.I Yogyakarta dikarenakan IPM menunjukkan seberapa baik penduduk dalam mengakses hasil pembangunan berupa pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain (BPS 2017).

IPM di suatu daerah menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Peningkatan IPM berarti peningkatan terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat itu

sendiri. Sehingga peningkatan IPM akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah, kemudian produktivitas yang rendah dapat berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya IPM yang tinggi akan meningkatkan produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Indah Pangesti dan Rudy Susanto (2018:79) sejalan dengan penelitian hasil penelitian Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksana (2018:326) bahwa IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan IPM menunjukkan kemampuan penduduk dalam mengakses kebutuhan dasarnya sehingga dalam peningkatannya akan mengurangi kesenjangan.

4. Pengaruh PDRB, inflasi dan IPM secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2017.

Berdasarkan uji F PDRB, inflasi, dan IPM mempunyai pengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $8,413650 > 3,29$.

Peningkatan nilai PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan inflasi. Hal ini terjadi karena jika PDRB meningkat maka semakin banyak uang yang beredar, sehingga konsumsi rumah tangga juga akan meningkat dengan begitu inflasi juga ikut meningkat. Peningkatan inflasi akan menurunkan produksi dan pengurangan tenaga kerja, keuntungan pengusaha akan

berkurang dan pemasukan pajak juga akan berkurang. Sehingga bantuan kepada masyarakat ekonomi lemah atau miskin akan berkurang, yang berdampak pada penurunan IPM dan kesenjangan pendapatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Ryan Hartadi (2018:63) di dukung oleh penelitian Akbar Trio Saputro (2018) bahwa PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi dan IPM secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap peningkatan inflasi yang berdampak pada penurunan IPM, IPM berdampak negatif terhadap ketimpangan. Sehingga penurunan IPM akan meningkatkan ketimpangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya mengenai Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di D.I Yogyakarta Tahun 2011-2017 dapat diambil kesimpulan berikut;

1. Product Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tahun 2011-2017. Terdapat perbedaan nilai PDRB yang mencolok pada masing-masing wilayah di D.I Yogyakarta. Hal ini dikarenakan perbedaan sektor penggerak perekonomian di masing-masing daerah.
2. Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tahun 2011-2017. Kondisi inflasi di D.I Yogyakarta dapat dikatakan normal

sehingga kenaikan harga yang ringan akan meningkatkan semangat pengusaha dalam meningkatkan produksi, dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan penurunan ketimpangan pendapatan.

3. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tahun 2011-2017. Peningkatan IPM berarti peningkatan terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Sehingga peningkatan IPM akan menurunkan ketimpangan pendapatan.
4. Product Domestic Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tahun 2011-2017. Peningkatan nilai PDRB akan meningkatkan inflasi, yang berdampak pada penurunan IPM dan pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan dalam pengelolaan pengeluaran dapat menyediakan infrasukutr untuk mendorong pengembangan di berbagai sektor. Karena infrastruktur merupakan pendukung proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir.
2. Pemerintah memberikan pembatasan produksi untuk perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu, dan memperketat atau membatasi barang impor untuk menjaga stabilitas inflasi.
3. Pemerintah memberikan sosialisasi dan bantuan kepada orang tua yang tidak

mampu menyekolahkan anaknya. Hal ini dilakukan untuk menyadarkan orang tua tentang pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan secara gratis untuk masyarakat yang kurang mampu.

4. Masyarakat sebaiknya mendukung setiap kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah dengan ikut serta dalam meningkatkan PDRB dan menjaga stabilitas inflasi dengan mengkonsumsi produk dalam negri serta meningkatkan IPM dengan memberikan pendidikan setinggi mungkin kepada anak, agar kebijakan pemerintah dalam PDRB, inflasi dan IPM, dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yoyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Autor, Naelul.2018.*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah Tahun 2010-1017*. Universitas Islam Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2017*. BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Bantul Dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Bantul.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Gunung Kidul Dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Gunung Kidul.

- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Kulon Progo. Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Sleman. Negara, Radi. 2012. *Analisis Pengaruh Kondisi Inflasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Negara Berkembang*. Universitas Padjadjaran.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018*. BPS Kota Yogyakarta. Saputro, Trio Akbar. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2018*. BPS Provinsi D.I. Yogyakarta. Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang Baduose Media.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Daerah Kota Yogyakarta 2018*. BPS Kota Yogyakarta. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: ALVABETA.
- Chrisamba, Galaxi dan Birgitta Dian Saraswati. 2016. *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan 33 Provinsi Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol.6 No.1*. Universitas Kristen Satya Wacana. Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga: Edisi Kedelapan*. Jakarta: Erlangga.
- Hartadi, Ryan. 2018. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Jawa Tengah*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yuliadi, Imamudi. 2015. *Ekonometrika Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Mitra Pustaka Nurani (MATARAM).
- Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, Dan Kebijakan*. Yogyakarta: Unit